

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kinerja perusahaan merupakan cerminan dari keberhasilan perusahaan dalam menjalankan berbagai aktivitas operasionalnya (Muharam & Atyanta, 2021). Hal ini menunjukkan seberapa baik perusahaan dalam memanfaatkan dan mengelola sumber dayanya secara optimal, baik secara efektif maupun efisien, dalam kurun waktu tertentu demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam dunia bisnis yang semakin kompetitif, kinerja perusahaan tidak hanya dilihat dari sudut pandang internal seperti laba bersih atau efisiensi penggunaan aset, tetapi juga dari bagaimana pasar merespons seluruh aktivitas dan keputusan manajemen perusahaan (Hendayani & Yuyetta, 2022). Hal ini sejalan dengan pendapat yang diungkapkan oleh Fitani & Amanah (2022), bahwa perhitungan rasio pasar dapat digunakan oleh investor sebagai salah satu alat untuk menilai kinerja perusahaan, karena rasio ini mencerminkan pandangan pasar terhadap risiko serta potensi pertumbuhan perusahaan di masa depan.

Rasio pasar umumnya dihitung dengan menggunakan harga saham sebagai salah satu komponennya, termasuk rasio Tobin's Q, sehingga fluktuasi harga saham dapat memengaruhi penerapan rasio tersebut. Harga saham di pasar modal sering kali dijadikan indikator atas persepsi pasar terhadap kinerja perusahaan, sehingga peningkatan kinerja perusahaan umumnya diikuti oleh meningkatnya minat serta kepercayaan investor (Damayanti & Firmansyah, 2021). Kinerja perusahaan yang positif mendorong investor untuk menanamkan modalnya melalui pembelian saham (Dzahabiyya *et al.*, 2020).

Bagi investor domestik dan asing, memahami pergerakan harga saham sangat penting karena hal ini menjadi sinyal dalam pengambilan keputusan investasi. Fluktuasi harga saham mencerminkan bagaimana pasar merespons

terhadap informasi yang berkaitan dengan kinerja dan prospek perusahaan di masa depan.

Berbagai penelitian terdahulu telah mempertimbangkan faktor *good corporate governance* (GCG) atau tata kelola perusahaan yang baik yang berpotensi memengaruhi kinerja perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Saragih *et al.* (2021) mengungkapkan bahwa GCG dipandang sebagai suatu pendekatan strategis yang bertujuan untuk mendorong peningkatan kinerja perusahaan. Selain itu, Dewi & Kuswati (2022) juga berpendapat bahwa GCG merupakan faktor penting yang memengaruhi peningkatan kinerja perusahaan, karena kinerja perusahaan sangat berkaitan dengan laporan keuangan yang biasanya dijadikan sebagai dasar utama dalam penilaian terhadap capaian kinerja tersebut.

Pengaruh GCG terhadap kinerja perusahaan juga dapat dilihat melalui mekanisme-mekanisme operasionalnya. Penelitian Muharam & Atyanta (2021) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, dan komite audit secara individual memiliki pengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Temuan ini memperkuat bahwa efektivitas GCG tidak hanya bergantung pada penerapan menyeluruh, tetapi juga pada peran aktif masing-masing komponennya. GCG memastikan adanya prosedur yang transparan dan jelas dalam pengambilan keputusan serta pengawasan yang efektif agar keputusan yang dibuat dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan kepentingan seluruh pemangku kepentingan. GCG merupakan topik yang menarik perhatian karena penerapannya berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap kinerja perusahaan. Di Indonesia, diketahui bahwa penerapan GCG masih belum berjalan secara optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari sejumlah kasus pelanggaran tata kelola yang terjadi di berbagai perusahaan, termasuk kasus korupsi yang terjadi pada perusahaan berskala besar seperti PT Waskita Karya Tbk. Praktik korupsi masih menjadi perhatian serius di tengah masyarakat dan kerap disorot oleh berbagai media (Azzahra *et al.*, 2023). Kondisi ini menjadi salah satu faktor yang memperburuk sistem perekonomian

nasional, merusak kepercayaan investor, serta merugikan para pemangku lainnya.

PT Waskita Karya Tbk. merupakan salah satu BUMN terbesar di sektor infrastruktur Indonesia. Kasus korupsi yang dilakukan oleh perusahaan ini berlangsung pada periode 2016 hingga 2020, dan baru terungkap secara resmi pada tahun 2022 setelah ditemukannya penyimpangan dana dalam sejumlah proyek yang dikerjakan. Praktik korupsi tersebut melibatkan pemalsuan dokumen proyek dan laporan keuangan, termasuk rekayasa atas pencairan dana untuk proyek fiktif. Melalui artikel yang ditulis oleh Meliana (2023) yang dimuat di Suara.com, dugaan korupsi ini mulai terungkap ketika manajemen PT Waskita Karya Tbk dan PT Waskita Beton Precast menemukan adanya indikasi penyalahgunaan dana pada proyek pembangunan Tol Kriyan–Legundi–Bunder–Manyar (KLBM). Kasus ini melibatkan berbagai jajaran direksi, termasuk Direktur Utama PT Waskita Karya Tbk. saat itu, Destiawan Soewardjono, yang diduga melakukan penyimpangan dengan memberikan perintah untuk menyetujui pencairan dana *supply chain financing* (SCF) dengan menggunakan dokumen pendukung palsu. Dana yang dicairkan kemudian digunakan untuk membayar utang perusahaan dan kebutuhan lain yang tidak berhubungan dengan proyek tersebut.

Berdasarkan artikel yang ditulis oleh Romys (2023) dalam CNBC Indonesia, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mencatat bahwa kerugian keuangan negara akibat kasus ini pada tahun 2020 mencapai sekitar Rp2,54 triliun. Selain itu, PT Waskita Karya Tbk juga diduga melakukan manipulasi laporan keuangan. Wakil Menteri II BUMN mengungkapkan bahwa laporan keuangan yang disajikan tidak akurat dalam menggambarkan kondisi finansial sebenarnya, di mana laba telah dilaporkan positif selama bertahun-tahun, faktanya menunjukkan bahwa arus kas perusahaan tidak pernah positif (Amelia & Ardini, 2024). Penerapan prinsip GCG oleh PT Waskita Karya, termasuk pembentukan komite audit yang diketuai oleh komisaris independen, ternyata belum mampu mencegah terjadinya kasus tersebut (Sulendrakusuma,

2011). Lemahnya fungsi pengawasan internal seperti dewan komisaris dan komite audit, serta minimnya keterlibatan pemegang saham institusional sebagai mekanisme pengendali, menunjukkan bahwa sistem pengawasan di dalam perusahaan belum berjalan efektif. Oleh karena itu, kasus PT Waskita Karya Tbk menjadi bukti nyata bahwa penerapan GCG di Indonesia masih perlu diperkuat, tidak hanya secara prosedural, melainkan juga melalui partisipasi dan tanggung jawab penuh dalam struktur tata kelola perusahaan.

Muharam & Atyanta (2021) menemukan bahwa struktur kepemilikan seperti kepemilikan institusional, dan mekanisme internal GCG seperti komisaris independen dan komite audit signifikan dalam menentukan kinerja perusahaan. Hal ini tercermin dari hubungan positif yang ditunjukkan terhadap indikator kinerja perusahaan, yaitu Tobin's Q. Dalam penerapan GCG, struktur kepemilikan memiliki pengaruh yang cukup besar, karena berperan sebagai mekanisme pengawasan yang dapat mengurangi konflik kepentingan antara agen dan prinsipal. Kepemilikan institusional merupakan proporsi saham perusahaan yang dimiliki oleh lembaga atau institusi. Jenis kepemilikan ini memiliki peran strategis dalam mengawasi dan mengendalikan perilaku agen, serta berfungsi untuk membatasi perilaku agen yang bersifat oportunistis atau hanya menguntungkan diri sendiri yang dapat merugikan perusahaan (Darsani & Sukartha, 2021). Kepemilikan ini juga berkontribusi dalam proses pengambilan keputusan perusahaan melalui penyediaan informasi yang bernilai, yang pada akhirnya dapat mendorong peningkatan kinerja perusahaan (Dihardjo & Hersugondo, 2023).

Penelitian Kao *et al.* (2019) menemukan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara hubungan kepemilikan institusional dengan kinerja perusahaan yang diproksikan oleh Tobin's Q. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lestari & Juliarto (2017), di mana kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Namun, berbanding terbalik dengan penelitian Agasva & Budiantoro (2020) dan Maulana (2020) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional

berpengaruh negatif terhadap kinerja perusahaan yang diproksikan oleh Tobin's Q.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 33/POJK.04/2014, komisaris independen merupakan anggota dewan komisaris yang berasal dari pihak luar emiten atau perusahaan publik dan tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, atau hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali maupun anggota direksi dan dewan komisaris lainnya. Keberadaan komisaris independen bertujuan untuk memastikan terlaksananya fungsi pengawasan yang objektif dan independen, sekaligus memberikan perlindungan terhadap kepentingan pemegang saham minoritas dalam proses pengambilan keputusan strategis perusahaan. Komisaris independen adalah bagian pokok dari mekanisme GCG yang berperan menjamin strategi perusahaan terlaksana, mengawasi agen dalam operasional perusahaan, serta memastikan agen sudah melaksanakan tanggung jawabnya. Oleh karena itu, komisaris independen dituntut untuk memiliki independensi yang merupakan syarat utama dalam menjalankan perannya secara efektif (Titania & Taqwa, 2023).

Beberapa hasil penelitian terdahulu menunjukkan hubungan positif antara dewan komisaris independen dan kinerja perusahaan yang diproksikan oleh Tobin's Q (Agasva & Budiantoro, 2020; Titania & Taqwa 2023; Winter *et al.*, 2021). Hasil tersebut mengindikasikan bahwa proporsi dewan komisaris independen yang besar berkontribusi terhadap peningkatan kinerja perusahaan. Namun, hasil berbeda ditemukan dalam penelitian Maulana (2020) dan Harjito *et al.* (2020) yang tidak menemukan pengaruh signifikan atau bahkan menunjukkan hubungan negatif antara dewan komisaris independen dan kinerja perusahaan.

Komite audit adalah bagian dari struktur tata kelola perusahaan yang dibentuk oleh dewan komisaris perusahaan. Dengan adanya fungsi pengawasan dari komite audit, diharapkan dapat mencegah agen melakukan kecurangan dalam proses penyusunan laporan keuangan (Handriani, 2020). Oleh karena itu,

keberadaan komite audit merupakan salah satu pilar penting dalam penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola perusahaan. Penelitian terdahulu mengenai hubungan komite audit terhadap kinerja perusahaan yang diprosikan oleh Tobin's Q sudah banyak dilakukan, namun hasilnya cenderung tidak konsisten. Dakhallh *et al.* (2020) dan Khasanah & Sutrisno (2024) menemukan bahwa komite audit memiliki pengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Sedangkan temuan Titania & Taqwa (2023) dan Avanda & Widiatami (2024) menyatakan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap kinerja perusahaan.

Penelitian ini difokuskan pada sektor infrastruktur karena sektor ini memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia (2024) menyatakan bahwa sektor infrastruktur di Indonesia menjadi salah satu prioritas utama dalam agenda pembangunan nasional, sebagaimana tercermin dalam berbagai kebijakan dan program pemerintah seperti Proyek Strategis Nasional (PSN). Komitmen pemerintah dalam mengembangkan infrastruktur menjadikan perusahaan-perusahaan di sektor ini sebagai pusat perhatian, baik dari sisi investor maupun regulator. Namun, tingginya ekspektasi terhadap perusahaan infrastruktur juga menuntut penerapan praktik GCG secara optimal guna memastikan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Penerapan GCG diyakini dapat meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan dan memperkuat kinerja perusahaan, terutama dalam menghadapi tantangan operasional maupun pengelolaan proyek berskala besar. Dengan demikian, pemilihan sektor infrastruktur menjadi relevan, karena di tengah pesatnya pembangunan, penting untuk mengevaluasi sejauh mana penerapan GCG dapat memengaruhi kinerja perusahaan di sektor infrastruktur.

Penelitian ini menindaklanjuti saran dari Agasva & Budiantoro (2020) dengan dengan mengkaji industri yang berbeda yaitu infrastruktur, menambah variabel kualitas audit, serta mempepanjang tahun penelitian. Penelitian ini

tidak menggunakan variabel kontrol, pemoderasi, maupun pemediasi, melainkan difokuskan untuk melihat pengaruh langsung antar variabel utama dalam menggambarkan model penelitian. Berdasarkan fenomena dan *research gap* yang telah diuraikan, maka penelitian ini akan dilanjutkan dengan judul **“Pengaruh Penerapan *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Perusahaan”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan?
2. Apakah dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan?
3. Apakah komite audit berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaruh kepemilikan institusional terhadap kinerja perusahaan.
2. Untuk menganalisis pengaruh dewan komisaris independen terhadap kinerja perusahaan.
3. Untuk menganalisis pengaruh komite audit terhadap kinerja perusahaan.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan literatur mengenai GCG dan kinerjanya, khususnya pada sektor infrastruktur di Indonesia. Temuan dari penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya serta memperkaya kajian akademik terkait hubungan antara mekanisme GCG yaitu kepemilikan institusional, komite audit, dan dewan komisaris independen dengan kinerja perusahaan.

2. Manfaat Praktis

b. Bagi Akademisi

Penelitian ini dapat menjadi referensi tambahan dalam studi-studi yang berkaitan dengan tata kelola perusahaan dan kinerja perusahaan, khususnya di sektor infrastruktur. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai dasar untuk penelitian selanjutnya yang ingin mengkaji variabel serupa atau mengembangkan model penelitian yang lebih kompleks.

c. Bagi Investor

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi investor dalam menilai kualitas tata kelola perusahaan sebagai salah satu indikator dalam pengambilan keputusan investasi. Pemahaman terhadap mekanisme GCG yang efektif dapat membantu investor mengidentifikasi perusahaan yang memiliki potensi kinerja yang baik dan risiko yang lebih rendah.

d. Bagi Perusahaan

Penelitian ini dapat menjadi masukan bagi manajemen perusahaan dalam mengevaluasi dan meningkatkan penerapan prinsip-prinsip GCG, seperti peran dewan komisaris independen, komite audit, dan struktur kepemilikan. Dengan menerapkan GCG yang baik, perusahaan diharapkan dapat meningkatkan efisiensi operasional dan kinerja keuangan secara berkelanjutan.

1.5 Sistematika Penulisan

Di dalam penyusunan skripsi ini, peneliti melibatkan langkah-langkah dengan pola yang terstruktur dan terorganisir, sehingga tiap bab memiliki panduan yang saling terkait satu sama lain.

BAB I PENDAHULUAN

BAB I berisi mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan serta kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

BAB II berisi tinjauan pustaka yang menguraikan teori-teori yang menjadi landasan atas dilaksanakannya penelitian ini dan hasil-hasil dari penelitian sejenis yang lalu. Pada bab ini dijelaskan juga kerangka penelitian teoritis serta pengembangan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

BAB III menguraikan kerangka penelitian yang dioperasionalkan didalam penelitian. hal itu mencakup definisi operasional, pengukuran variabel, populasi, sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, identifikasi variabel, serta metode analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

BAB IV berisi penjelasan mengenai hasil uji hipotesis yang sudah dilaksanakan dan interpretasi hasil yang mencakup deskripsi dan analisis data serta pembahasan hasil.

BAB V KESIMPULAN

BAB V berisi kesimpulan penelitian, keterbatasan, dan saran yang diperlukan untuk penelitian berikutnya.